



## **Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilai Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Labuhanbatu**

**Efrilisa Asnuna Hsb<sup>1</sup>, Azwar Hamid<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

<sup>1</sup>*Efrillisaasnunahsb@gmail.com*, <sup>2</sup>*Azwarhamid@uinsyahada.ac.id*

### **ABSTRAK**

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan dan rasio efisiensi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu menggunakan rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ilmu akuntansi sektor publik, yaitu dengan teori yang berkaitan khususnya dengan kinerja keuangan daerah, laporan keuangan daerah, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Peneliti menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan data primer berupa wawancara. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan rasio kinerja keuangan daerah dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2017-2021 menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio efisiensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk rasio kemandirian pada tahun 2017-2021 masuk dalam kategori rendah sekali, karena hasil pengukuran yang berada pada posisi 0%-25%. Pengukuran pada rasio efektivitas pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 masuk dalam kategori kurang efektif, karena hasil pengukuran berada di posisi 75%-89%. Sedangkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 masuk dalam kategori tidak efektif, karena hasil pengukuran <75%. Pengukuran menggunakan rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021 masuk dalam kategori tidak berhasil, karena hasil pengukuran <30%. Pengukuran efisiensi masuk dalam kategori sangat efisiensi, karena hasil pengukuran <5%. Namun pada tahun 2018 masuk dalam kategori efisiensi, karena hasil pengukuran 5%-10%.

**Kata Kunci:** Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan

## ABSTRACT

Regional autonomy is the authority of autonomous regions to regulate and manage the interests of the aspirations of the community and in accordance with applicable laws and regulations. One aspect of local government that must be regulated carefully is the management of regional finances. The formulation of the problem in this study is, how is the financial performance of the Labuhanbatu Regency Regional Asset Finance Management Board in terms of the independence ratio, the effectiveness ratio, the growth ratio and the efficiency ratio. The purpose of this study was to find out the financial statements of the Labuhanbatu Regency BPKAD using financial ratios in assessing financial performance.

The theory used in this study is related to public sector accounting, namely with theories related specifically to regional financial performance, regional financial reports, independence ratios, effectiveness ratios, growth ratios, and efficiency ratios.

This type of research uses descriptive quantitative methods. Researchers use secondary data in the form of financial reports and primary data in the form of interviews. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The data is then analyzed using regional financial performance ratios with the Realization Report of the Regional Revenue and Expenditure Budget for 2017-2021 using the independence ratio, effectiveness ratio, growth ratio, and efficiency ratio.

The results of this study indicate that the Regional Financial and Asset Management Agency for the independence ratio in 2017-2021 is in the very low category, because the measurement results are in the position of 0% -25%. Measurements of the effectiveness ratio in 2017 and 2019 are in the less effective category, because the measurement results are in the position of 75% -89%. Whereas in 2018, 2020 and 2021 they are included in the ineffective category, because the measurement results are <75%. Measurements using growth ratios in 2017-2021 are in the unsuccessful category, because the measurement results are <30%. Efficiency measurements fall into the very efficient category, because the measurement results are <5%. But in 2018 it is included in the efficiency category, because the measurement results are 5% -10%.

**Keywords:** Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Growth Ratio

## PENDAHULUAN

Otonomi berasal dari kata Yunani *autos* dan *nomos*. Kata pertama berarti “sendiri”, dan kata kedua berarti “perintah”. Otonomi bermakna “memerintah sendiri”. Dalam kegiatan administrasi publik daerah otonomi sering disebut sebagai *local self government*. Inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah keleluasan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar pra-karsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya masing-masing. Pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah harus dikelola dengan baik, salah satu dengan pengelola keuangan daerah. (Primanto, 2020).

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode-periode sebelumnya, sehingga diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan, (Sufyati, 2021) yaitu rasio kemandirian Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Sopannah, 2020). Rasio efektivitas digunakan untuk mengetahui hubungan antara hasil yang dicapai suatu program dalam memenuhi tujuan yang diharapkan. Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode keperiode berikutnya. Rasio Efisiensi digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

**Tabel 1 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021 (dalam jutaan rupiah)**

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan Daerah	1.312.715	133.747,8	1.318.715	933.747,8	1.094.202
Total Belanja	1.367.520	945.701,8	1.367.520	945.701,8	1.009.426
Surplus / (Defisit)	-48.804,9	-11.954	-48.804,9	-11.954	84.775,92

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Berdasarkan tabel 1 bahwa realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017-2020 mengalami defisit dikarenakan realisasi belanja lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Labuhanbatu. Kemudian pada tahun 2021 mengalami surplus dikarenakan lebih besar realisasi anggaran pendapatan daerah dibandingkan dengan realisasi belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu. Namun dapat diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 terjadi peningkatan dan penurunan atas realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Labuhanbatu yang menyebabkan pada tahun 2018 dan 2020 mengalami keuangan yang realisasinya minim disebabkan pendapatan asli daerah yang sedang menurun. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja.

Oleh karena itu peneliti berminat melakukan penelitian dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah, melalui analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (ABPD), menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan.

## **TINJAUAN TEORITIK**

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Menurut (Fahmi, 2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

### **Laporan Keuangan Daerah**

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang terutama diajukan bagi kepentingan pihak luar pemerintah daerah tersebut. Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

### **Jenis-jenis Laporan Keuangan Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2003 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004, modul laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan menyatakan bahwa jenis-jenis laporan keuangan adalah laporan realisasi, neraca (balance sheet), laporan arus kas (statement of cash), catatan atas laporan keuangan (notes to financial statements).

### **Pengukuran Kinerja Keuangan**

Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja keuangan dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari perusahaan dan akan dapat diketahui hasil-hasil yang dicapai dari waktu-waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan.

### **Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan**

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat lagi manajemen dan pengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan tergantung pada sudut pandang yang diambil dan tujuan analisis. Karena alasan itu dalam manajemen perusahaan sangat perlu menyesuaikan kondisi

perusahaan dengan alat ukur penilaian kinerja yang akan digunakan serta tujuan pengukur kinerja keuangan tersebut. (Ningrum, 2022)

### **Indikator Kinerja Keuangan**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini indikator akan dikategorikan. Suatu indikator kinerja kedalam ukuran upaya dan ukuran hasil serta membedakan antara ukuran penyedia layanan dengan ukuran bagi masyarakat.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Primbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 6 bahwa sumber pendapatan asli daerah meliputi dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan lain-lain.

### **Pengelola Keuangan Daerah**

Pengelola keuangan daerah harus transparan yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

### **Laporan Realisasi Anggaran LRA**

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tersebut yang dilakukan di Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu . Penelitian analisis rasio keuangan daerah untuk menilai Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten labuhanbatu dilakukan pada bulan Juni 2022 sampai dengan September 2022.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dan data primer.

Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator Kinerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu menggunakan rasio-rasio sebagai berikut rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, rasio efisiensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah perbandingan antara pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi dan menunjukkan daerah mana yang mampu membiayai sendiri kegiatan bayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. (Harmovinsah, 2020) Dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer dan Pinjaman}} \times 100\%$$

**Tabel 2 Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian
2017	175.334.946.116,71	1.012.228.495.149,00	17,32%
2018	67.379.199.960,97	866.368.570.365,00	0,07%
2019	175.334.946.116,71	1.012.228.495.149,00	17,32%
2020	67.379.199.960,97	866.368.570.365,00	0,07%
2021	139.566.608.578,41	950.575.832.700,00	14,68%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah: Oktober 2022).

**Tabel 3 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah**

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsuktatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020.

Berdasarkan tabel 2 diatas, terlihat bahwa Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017-2021 tingkat kemandiriannya dikatakan pola hubungan instruktif (rendah sekali), karena, sangat bergantung pada pemerintah pusat dan juga belum mampu melaksanakan otonomi daerah. hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017 sebesar

17,32%, yang termaksud dalam kategori rendah sekali. Untuk tahun 2018 sebesar 0,07% mengalami penurunan dimana dalam pola hubungan instruktif. Pada tahun 2018 dan mengalami kenaikan sebesar 17,32%, pada tahun 2019 dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif dan 0,07% pada tahun 2020 dikategorikan rendah sekali dimana pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2021 sebesar 14,68% dikategorikan rendah sekali dan dalam pola hubungan instruktif.

### Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, apakah bisa memenuhi tujuan diterapkan. Sehingga efektivitas merupakan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai, semakin besar kontribusi hasil terhadap harapan atau tujuan ataupun target dari sesuatu kegiatan maka semakin efektif suatu organisasi tersebut. (Ambar, 2022) Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

**Tabel 4 Rasio Efektivitas Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2017	175.334.946.116,71	225.869.464.200,00	77,63%
2018	67.379.199.960,97	225.869.464.200,00	29,83%
2019	175.334.946.116,71	225.869.464.200,00	77,63%
2020	67.379.199.960,97	225.869.464.200,00	29,83%
2021	139.566.608.578,41	239.690.323.904,00	58,22%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. (Data diolah, Oktober 2022).

**Tabel 5 Kriteria Pengukuran Efektivitas**

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektifitas (%)
Sangat Efektifitas	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 4 hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Labuhanbatu yaitu kemampuan kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efektivitas, dikatakan belum efektif dalam merealisasikan dalam pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu diawali pada tahun 2017 dan 2018 dikatakan tidak efektif dimana rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah sebesar 77,63% dan pada tahun 2018 menjadi 29,83%, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 77,63% dan pada tahun 2020 menjadi 29,83%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 58,22% dikategorikan tidak efektif.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan PAD yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih baik dalam memperoleh PAD dibandingkan dengan periode sebelumnya, semakin besar rasio pertumbuhan maka semakin baik. (Suriani, 2022) Dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_{t_n} - \text{PAD}_{t_0}}{\text{PAD}_{t_0}} \times 100\%$$

**Tabel 6 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2017- 2021**

Tahun	PAD <sub>t<sub>n</sub></sub> (Rp)	PAD <sub>t<sub>0</sub></sub> (Rp)	Rasio Pertumbuhan
2018/2017	133.747.770.325,97	1.312.715.109.320,71	-0,90%
2019/2018	933.747.770.325,97	133.747.770.325,97	5,98%
2020/2019	933.747.770.325,97	1.318.715.109.320,71	-0,29%
2021/2020	1.094.201.970.193,41	933.747.770.325,97	0,17%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah, Oktober 2022).

**Tabel 7 Kriteria Laju Pertumbuhan**

Persentase	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup Berhasil
30% - 55%	Kurang Berhasil
<30%	Tidak Berhasil

Pada tabel 6 di atas, rasio pertumbuhan pada tahun 2018/2017 sebesar -0,90% naik menjadi 5,98%, pada tahun 2019/2018, kemudian turun menjadi -0,29%, pada tahun 2020/2019, dan pada tahun 2021/2020 sebesar 0,17%. Dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran tahun 2017-2021 semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan hanya pada tahun 2019/2020 memiliki hasil positif. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021 dikatakan masih belum berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, karena selama 5 tahun rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga dikatakan belum stabil.

### Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. (Primandita, 2020). Rasio efisiensi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 8 Rasio Efisiensi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017-2021**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi
2017	1.367.519.966.301,99	1.312.715.109.320,71	1,04%
2018	945.701.763.681,84	133.747.770.325,97	7,07%
2019	1.367.519.966.301,99	1.318.715.109.320,71	1,03%
2020	945.701.763.681,84	933.747.770.325,97	1.01%
2021	1.009.426.053.168,53	1.094.201.970.193,41	0,92%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Labuhanbatu, (Data diolah: Oktober 2022)

**Tabel 9 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah**

Persentase Efisiensi %	Kriteria
<5	Sangat Efisiensi
5 – 10	Efisiensi
11 – 20	Cukup Efisiensi
21 -30	Kurang Efisiensi
>30	Tidak Efisiensi

Sumber : Primandita Fitriandi, dkk, 2020.

Dari tabel 8 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun 2017 sebesar 1,04%, mengalami peningkatan 7,07% tahun 2018, dan mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 sebesar 1,03% dan 1,01% pada tahun 2020, mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 sebesar 0,92%. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efisiensi, dikategorikan sangat efisiensi, karena kemampuan daerah kabupaten labuhanbatu dalam menjalankan tugas sesuai dengan kategori rasio efisiensi apabila yang dicapai minimal 1 (satu) atau dibawah 100 persen dikatakan sangat efisien.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti menggunakan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut pengukuran rasio kemandirian Berdasarkan perhitungan pada rasio

kemandirian diketahui pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2017-2021 mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat dari rasio kemandirian tahun 2017 sebesar 17,32%, yang masuk dalam kategori rendah sekali, dikarenakan tingkat kemandirian yang berada diantara 0% - 25%. Kemudian pada tahun 2018 memperoleh tingkat kemandirian sebesar 0,07% yang mengalami penurunan, dimana dalam kategori rendah sekali karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 17,32%, yang mana pada tahun 2019 dikategorikan rendah sekali dan termasuk pola hubungan instruktif, dan 0,07% pada tahun 2020 yang digategorikan rendah sekali, karena berada diantara 0% - 25%. Pada tahun 2021 sebesar 14,6% dikategorikan rendah sekali dan dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% - 25%. Rasio kemandirian pada kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun ditinjau dari rasio kemandirian pada tahun 2017-2021, dikatakan pola hubungan instruktif (rendah sekali), karena, sangat bergantung pada pemerintah pusat dan juga belum mampu melaksanakan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai rasio sebesar 77,63% dalam kriteria kurang efektif karena berada di 75%-89% dan pada tahun 2018 sebesar 29,83% dikategorikan tidak efektif karena dalam presentase efektivitas <75, Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu menjadi 77,63% dikategorikan kurang efektif dan pada tahun 2020 menjadi 29,83% yang dimana tidak efektif. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan 58,82% sama halnya pada tahun sebelumnya dikatakan tidak efektif (<75) pada presentase efektivitas. Pada dasarnya analisis rasio efektivitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan belum efektif apabila rasio yang dicapai masih dibawah 75%. Kemampuan kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efektivitas, dikatakan belum efektif dalam merealisasikan dalam pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Rasio pertumbuhan pada tahun 2018/2017 sebesar -0,90%, dan pada tahun 2019/2018 naik menjadi 5,98%. Sedangkan pada tahun 2020/2019 mengalami menjadi -0,29%, dan pada tahun 2021/2020 sebesar 0,71%. Dapat dilihat bahwa selama periode tahun anggaran tahun 2017-2021 semua rasio mengalami fluktuasi. Rasio pertumbuhan hanya pada tahun 2019/2020 memiliki hasil positif. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021 dikatakan masih belum berhasil dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, karena selama 5 tahun rasio pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga dikatakan belum stabil.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2017 mencapai 1,04% dikatakan sangat efisiensi karena berada <5, kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,07% dikatakan efisiensi karena berada pada 5- 10.

Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,03% dikategorikan sangat efisiensi, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 1,01% dikategorikan sangat efisiensi, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan drastis sebesar 0,92% dikategorikan efisiensi karena bedara pada <5. Kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu ditinjau dari rasio efisiensi, dikategorikan sangat efisiensi,

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan daerah dengan rasio keuangan daerah yaitu Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk rasio kemandirian pada tahun 2017-2021 masuk dalam kategori rendah sekali, karena hasil pengukuran yang berada pada posisi 0%-25%. Pengukuran pada rasio efektivitas pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 masuk dalam kategori kurang efektif, karena hasil pengukuran berada di posisi 75%-89%. Sedangkan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 masuk dalam kategori tidak efektif, karena hasil pengukuran <75%. Pengukuran menggunakan rasio pertumbuhan pada tahun 2017-2021 masuk dalam kategori tidak berhasil, karena hasil pengukuran <30%. Pengukuran efisiensi masuk dalam kategori sangat efisiensi, karena hasil pengukuran <5%. Namun pada tahun 2018 masuk dalam kategori efisiensi, karena hasil pengukuran 5%-10%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Syafia Nurul. Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015-2019. Skripsi: Politeknik Harapan Bersama, 2020.
- Arde Irvi Nurul Husna, Arman Permansyah. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Islam. Bekasi: Pustaka Al-Muqsih, 2021.
- Artha, Ni Putu Myari. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Arumdi, Rindang. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2013-2017. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.
- Azizah, Siti. Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah Ilmu Peternakan. Malang: UB. Press, 2021.
- Ana Sopanah, dkk. Akutansi Publik. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020.
- Bambang Sudaryana, dkk. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2022.
- Dr. Harmovinsah, dkk. Akutansi Publik. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Evanirosa, dkk. Penelitian Perpustakaan. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Fahmi. Analisis Kinerja Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat, 2018

- Hs Sufyati, dkk. Indikator Keuangan & Non Keuangan. Cirebon: Penerbit Insania,
- Kurhayadi, dkk. Kebijakan Publik di Era Digitalisasi. Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2020
- Koton, Yosep P. Restrukturisasi Organisasi. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019
- Kustia, Ayu. Analisis Rasio Pengelola Keuangan pada Pemerintahan Kabupaten Gowa Tahun 2014-2016. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018
- Mulyanto. Kajian Rasio Kemandirian Daerah Kota Lhokseumawe. Lhokseumawe: Bappeda Lhokseumawe, 2018.
- Murni Dahlena Nasution, Jumita Putri Rajana Harahap. "Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan pada Kinerja Pemerintah Kota Pedan." dalam jurnal Administrasi Bisnis 8, No. 1 (2019)
- Nur Ahmad Budi Yuliyanto, dkk. Metodologi Penelitian Bisnis. Malang: Polinema Press, 2018.
- Nadhiroh, Anis Nur. Pemberian Upah Pekerja/Buruh yang Adil dan Layak Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Jakarta: Guepedia, 2020
- Ningrum, Endah Prawesti. Nilai Perusahaan Konsep dan Aplikasi. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2022.
- Norma. Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016-2018. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.
- Primandita, dkk. Bunga Rampai Keuangan Negara. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN, 2020.
- Prasetya, Arfan. Analisis Kinerja Keuangan dengan Menggunakan Rasio Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016-2017. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2019
- Primanto, Aji. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Malang: PT. Cita Instrans Selaras, 2020.
- Purnama, Gusti Ayu. Akutansi dan Implementasi dalam Koperasi dan UMKM. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ruki Ambar, dkk. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: CV. Media Sins Indonesia, 2022.
- Sari, Maya. Pengukuran Kinerja Keuangan Berbasis Good Corporate Governance. Jawa Timur: Lentera Hati, 2021.
- Shihab, M Quraish. Al-Quran dan Maknanya. Jawa Timur: Lentera Hati, 2021.
- Suriani, Dr. Seri. Analisis Laporan Keuangan Kinerja Manajemen dan Prospek. Malang: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- Via Lita Bethry Anlia, Sufyati HS. Kinerja Keuangan Perusahaan Jakarta Islamic Index di Masa Pandemi. Cirebon: Insania, 2021.
- Wisnu U.R, Dicky. Teori Organisasi Struktur dan Desain. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.